

**KEBIJAKAN SOEKARNO TERHADAP PARTAI POLITIK
ISLAM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Ryan Daya Mauryandaswara

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ryan Daya Mauryandaswara

NIM : 02120999

Judul Skripsi : Kebijakan Soekarno Terhadap Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Adab Jurusan/ Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam sidang munaqasyah

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas, dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2008

Pembimbing


Drs. Badrun Alaena, M.Si.
NIP. 150 253 322



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/DA/PP.01.1/1169/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Soekarno terhadap Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ryan Daya Mauryandaswara

NIM : 02120999

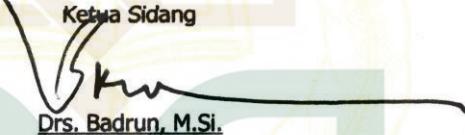
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Juni 2008

Nilai Munaqasyah : B-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Pengaji I


Dra. Hj. Siti Maryam, M.A.
NIP. 150221922

Pengaji II


Syamsul Arifin, S.Ag., M.Aq.
NIP. 150312445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



ABSTRAK

Sejarah Indonesia mencatat bahwa di negara ini pernah dilaksanakan sebuah sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin. Sistem sebelumnya dinamakan Demokrasi Parlementer. Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi perubahan orientasi sistem politik yang hendak dikembangkan. Bila pada masa sebelumnya (Parlementer), sistem politik berorientasi pada demokrasi multi partai, di mana partai-partailah kekuatan utama politik, maka di masa Terpimpin partai-partai justru diperlemah. Transisi menuju sistem baru ini mengubah konfigurasi kekuatan-kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno yang sebelumnya hanya seorang kepala negara berubah menjadi kepala pemerintahan, kekuatan militer juga menjadi semakin kuat karena lebih banyak mempengaruhi kebijakan. Bersama-sama, dua kekuatan ini menjadi penguasa Demokrasi Terpimpin. Dua kekuatan itu pula yang membubarkan Masyumi dan PSI. PKI berhasil masuk ke pemerintahan karena mendapat dukungan dari Soekarno. Partai-partai lainnya yang pernah berjaya di era Demokrasi Parlementer menjadi tak berdaya di hadapan penguasa.

Salah satu kekuatan politik yang bertahan dalam transisi menuju Demokrasi Terpimpin adalah NU, Perti dan PSII. Partai Islam ini bertahan karena mau menerima gagasan Demokrasi Terpimpin. Para pemimpinnya beranggapan bahwa kebutuhan politik saat itu adalah mempertahankan posisi NU di tengah percaturan politik nasional. Dalam pandangan mereka politik adalah sarana utama untuk mewujudkan kepentingan keagamaan dan melayani umat. Selama masa transisi hingga pelaksanaan Demokrasi Terpimpin partai ini banyak menggunakan politik akomodasi sebagai strategi. Ketua umum NU saat itu adalah Idham Chalid.

Jenis penelitian ini menggunakan sistem penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pengumpulan data Heuristik Tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran data sejarah yang diperoleh secara kritik ektern dan intern. Kritik ekstern dilakukan guna menguji keotentikan data sejarah, sedangkan kritik intern digunakan untuk membuktikan keakuratan sebuah data autentik. Merupakan langkah terakhir dalam penelitian dengan menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah yang berarti.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan Soekarno terhadap partai politik di masa Demokrasi Terpimpin ini bahwa yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “*Trial and Error*” yang elah membuatkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tinggi berupa: *pertama, gerakan separatis* dan *kedua, ideologi politik revolusioner*. Sedangkan respon partai NU ternyata mampu menjadi partner kerja yang baik bahkan partai Perti dapat bekerjasama dengan PKI.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"¹

Q.S. Al-Baqarah (1): 153



¹ Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Goresan Dalam Karya Sederhana Ini dan Teriring
Ungkapan Terimakasih Dengan Ketulusan Hati Yang Teramat
Dalam Kepada :*

*Mamaku dan Papaku Tercinta, Hj. Maryam & H. Maulana
Mu'min,*

Yang mengajariku untuk menyayangi hidup & kehidupan

Kakakku yang tersayang Letty Daya Pretty Margareth, S.Hi.

Adikku yang terkasih Mega Daya Mustika

Keponakanaku yang lucu Allea Nalacallya Nitirania

Sayangku yang tercinta

Ninik Isaryati S. S

Atas kesabaran, semangat dan do'anya

Guru-guruku,

*yang telah memberiku inspirasi & memperkenalkan huruf-huruf
Allah*

*Seluruh teman-teman dalam suka & duka terutama "engkau"
yang telah memberi makna hidup baru buatku*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : SEKILAS TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN.....	18
A Sejarah dan Pengertian Demokrasi Terpimpin	18
1 Sejarah Demokrasi Terpimpin	18

2 Pengertian Demokrasi Terpimpin	23
B Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin	34

BAB III : KEBIJAKAN SOEKARNO TERHADAP PARTAI POLITIK

ISLAM	
A Konfigurasi Politik Soekarno	39
1 Gerakan Separatis (1959)	42
2 Ideologi Politik Revolusioner Sebagai Manipol Usdek (1959)	45
B Partai Politik Islam Masa Demokrasi Terpimpin	55
1 Partai Politik Islam Masyumi	56
2 Partai Politik Islam PSII	58
3 Partai Politik Islam NU	60
4 Partai Politik Perti	61
C Bentuk-Bentuk Kebijakan Sockarno	62
1 Kebijakan Politik	62
2 Kebijakan ekonomi	66

BAB IV: RESPON PARTAI POLITIK ISLAM TERHADAP DEMOKRASI TERPIMPIN.....

A Respon Terhadap Konsep demokrasi	67
B Respon Terhadap Demokrasi Terpimpin	71
C Respon Terhadap konsep Ideologi	85

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1 Terjemahan	I
2 Curriculum Vitae	II



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين .أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله والصلوة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم
القيمة

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Adab dan Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab beserta staf-stafnya. yang telah memperlancar proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Maharsi selaku Penasehat Akademik selama penyusun menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Badrun Alaena, M. Si. Selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna memimpin dan memberikan pengarah, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Hormat ta'zim penyusun kepada kedua orang tua (H. Maulana Mu'min & Hj. Maryam), kakakku Letty Daya Pretty Margareth, S. Hi beserta anaknya Allea

Nalacallya Nitirania dan adikku Mega Daya Mustika serta tunanganku tercinta Ninik Haryati S.s, adek Ratna yang telah memberikan do'a restu dan dorongan semangat yang tiada henti kepada penyusun.

5. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah memberikan dorongan semangat, Mansyur S.Hi. Udi Mulyanto beserta keluarganya, Fuad Solihan S. e beserta keluarganya, Jejen, Kodir, Adur (Gusdur), Ibong, Ucup, Avet, Doyox's, Latuf, Agus kentus (Krapyak), dan teman-teman MATRIX (Mas Indi, Mutho, Aufusuhada, Warnoto S. Hi, Aris dan Emil, Agus (Cete'), Adon, Asep Lurus, Asep Iting, Muhamid, Wasnadi, Nurhadi (Kopral), Gepenk, Ria, Nurjanah,)
6. Terima kasih kepada teman-teman kelas SPI/A, Fauzan, Isbat S. Hum, Agus S. Hum, Pariyanto S. Hum, Purwanto S. Hum, Ari Wibowo S. Hum, Udin, Janang S. Hum, Iwan Yuliawan, Abu Salim, Muhib S. Hum, Samin S. Hum, Arif (Ngapak), Ali Sodikin S. Hum, Batur S. Hum, Sofwan, Emi (Gendut), Saiful Haq, Farida S. Hum, Fathurahman (Gendut), dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Terima kasih kepada teman-teman KKNR, Adib, Andre, Arif, Dwi, Faza, Ganjar, Iis, Imam, Niken, Nining, Partini, Pendie, Kiki, Syafi'i, Yani, Ipung.

Yogyakarta, 11 Juli 2008
Penyusun,



Ryan Daya Mauryandaswara
NIM. 02120999

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ş	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ħ	ħ (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	T (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ءـ	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau difong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—_—	Fathah	a	A
—_—_—	Kasrah	i	I

----- Dammah u U

Contoh:

كتب	- <i>kataba</i>	يذهب	- <i>yazhabu</i>
سئل	- <i>su'ila</i>	ذكر	- <i>zukira</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kai'fa* هول - *hau'a*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atas	a	a dengan garis di
ي	Fathah dan ya atas	ā	a dengan garis di
ى	Kasrah dan ya atas	ī	i dengan garis di

و Dammah dan wawu
atas u dengan garis di

Contoh:

قال	-	<i>qāla</i>	قَالَ	-	<i>qīla</i>
رمى	-	<i>ramā</i>	يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الجنّة روضة *Raudah al-Jannah*
طّلاقه *Talḥah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: بنار *rabbana*

نعم *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم	- <i>al-qalamu</i>	الجلال	- <i>al-jalalu</i>
النعم	- <i>al-ni'amu</i>		

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

رسول إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا - *Wa ma_ Muhammadi illa rasul*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : SEKILAS TENTANG DEMOKRASI TERPIMPIN.....	18
A Sejarah dan Pengertian Demokrasi Terpimpin	18
1 Sejarah Demokrasi Terpimpin	18

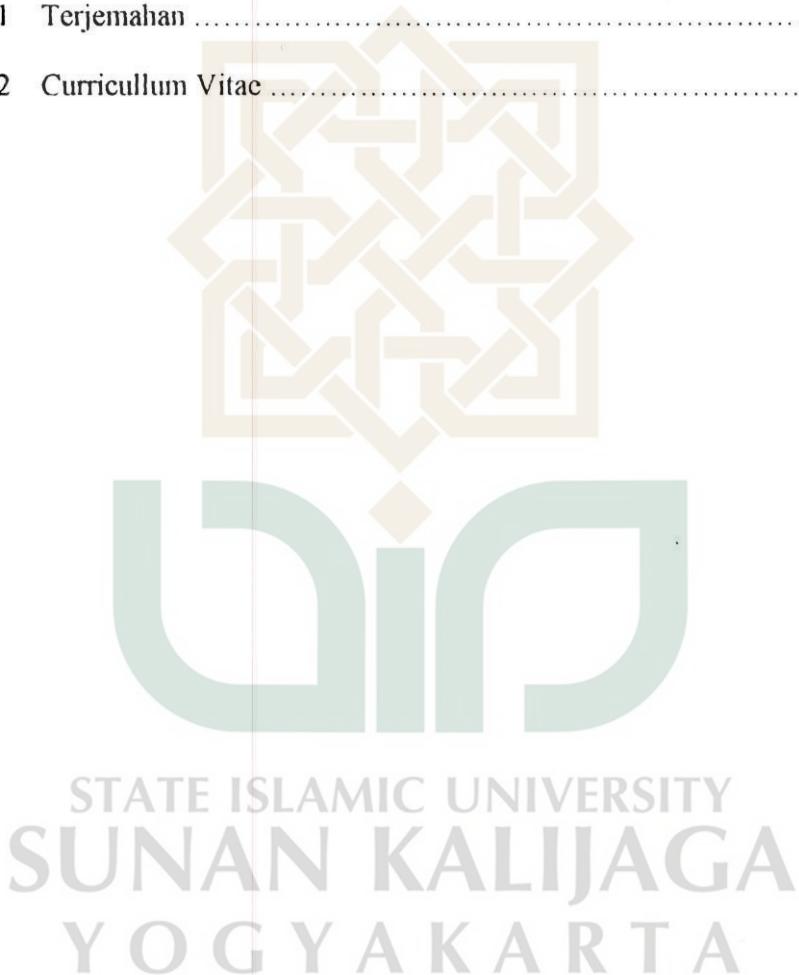
2 Pengertian Demokrasi Terpimpin	23
B Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin	34
BAB III : KEBIJAKAN SOEKARNO TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM	
A Konfigurasi Politik Soekarno	39
1 Gerakan Separatis (1959)	42
2 Ideologi Politik Revolusioner Sebagai Manipol Usdek (1959)	45
B Partai Politik Islam Masa Demokrasi Terpimpin	55
1 Partai Politik Islam Masyumi	56
2 Partai Politik Islam PSII	58
3 Partai Politik Islam NU	60
4 Partai Politik Perti	61
C Bentuk-Bentuk Kebijakan Soekarno	62
1 Kebijakan Politik	62
2 Kebijakan ekonomi	66

BAB IV: RESPON PARTAI POLITIK ISLAM TERHADAP DEMOKRASI

SUNAN KALIJAGA TERPIMPIN.....

A Respon Terhadap Konsep demokrasi	67
B Respon Terhadap Demokrasi Terpimpin	71
C Respon Terhadap konsep Ideologi	85

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1 Terjemahan	I
2 Curriculum Vitae	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 tidak lepas dari perjuangan dan peran umat Islam, banyak sekali peran yang dimainkan oleh umat Islam seperti di bidang pendidikan, sosial, maupun politik. Di bidang politik, umat Islam nampak dengan pendirian partai, seperti Masyumi, NU, Perti, dan PSII. Islam hingga Tahun 60-an, pasca pemberantasan PKI Tahun 1965 partai Islam disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan hingga saat inipun masih banyak partai Islam bermunculan.

Pada Tahun 1959-1965 kondisi demokrasi Indonesia bukan hanya menurun, tetapi menjadi diktator. Masa ini tercatat bangkit dan berkembangnya sebuah pemerintahan otokrasi yang menumpas tanpa segan setiap oposisi yang akan merongrongnya. Sistem ini berawal dari konsepsi Presiden yang kemudian berkembang menjadi “Demokrasi Terpimpin”.¹ Hal tersebut tentunya dikarenakan Soekarno ingin memperkuat kekuasaannya. Sebagai titik balik apa yang disebut “Demokrasi Liberal” yang selama ini

¹ Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno yaitu (1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan kepentingan umum , masyarakat dan negara; (2) Tiap-tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Indonesia*. (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 174-175.

dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.² Dengan “Demokrasi Terpimpin”, Soekarno ingin menemukan dirinya sebagai ayah satu famili besar dari rakyat Indonesia dengan kekuasaan terpusat sepenuhnya ditangganya.³

Soekarno beranggapan bahwa “Demokrasi Liberal” tidak cocok untuk masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Demokrasi Liberal” akan menimbulkan gelombang saling berebut mencari keuntungan dengan mengorbankan satu sama lain demi tercapainya satu tujuan. Maka alangkah tepatnya jika kembali ke UUD 1945 dan pembubaran majlis Konstituante serta menandatangani sistem politik yang disebut “Demokrasi Terpimpin”.⁴

Gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang dicetuskan Sockarno menimbulkan pro dan kontra atau terjadi perbedaan pendapat yang menjurus ke arah permusuhan antar partai-partai politik yang ada, baik itu partai politik Islam maupun lainnya. Dalam hal ini partai Masyumi (gabungan NU dan Muhamadiyah) menolak pandangan presiden, Masyumi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konsepsi presiden yang berarti terjadinya

² Ahmad Syaf'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 184.

³ Amin S. M. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 32.

⁴ Soegiharso Soeroso, *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai*, (Jakarta: Antar Kota, 1989), hlm. 25.

penguburan partai-partai politik dan penguburan itu menimbulkan sistem diktator.

Namun pada masa Demokrasi Terpimpin diberlakukan Tahun 1952,⁵ NU menyatakan keluar dari Partai Masyumi dan berdiri menjadi partai politik sendiri.⁶ Keputusan itu diambil dalam Muktamar bulan Mei 1952 di Palembang, sehingga NU mampu menjadi organisasi yang dekat dengan pemerintah.⁷ Keberadaan NU lebih jauh melengkapi keberadaan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya yang mengambil peran keagamaan.

NU berharap agar Masyumi dijadikan bentuk federasi, ternyata Masyumi tidak menanggapi usulan NU tersebut, sehingga NU mengarahkan perhatiannya pada PSII dan Perti, untuk membuat sebuah badan federasi, maka pada tanggal 30 Agustus 1952 diresmikan berdirinya Liga Muslimin Indonesia yang meliputi NU, PSII dan Perti. Kegiatan ini ditujukan untuk pembentukan kabinet baru, yaitu Kabinet Ali I 30 Juli 1953-12 Agustus 1955. Selain itu juga karena semakin dekatnya pemilu pertama yang ternyata baru dapat dilaksanakan pada Tahun 1955.⁸

Pada masa Demokrasi Terpimpin, panggung politik Indonesia praktis didominasi oleh tiga kekuatan yaitu: politik Soekarno, PKI dan Angkatan

⁵ Hasil-hasil Muktamar NU ke-28, (Jakarta: PBNNU), hlm. 26.

⁶ Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, *Aswaja ke-NU-an sesuai GBPP 1994*, Jilid 3, (Surabaya: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 1994), hlm. 59. Lihat juga Einar Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 108-109.

⁷ Syaifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 65.

⁸ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1952), hlm. 578.

Darat, dengan menyisakan sedikit porsi peran yang tidak berarti untuk partai-partai politik yang ada. Seiring dengan perjalanan waktu, NU mulai menampakkan sikap politiknya baik terhadap para pembaharu Islam maupun terhadap pemerintah. Sejak awal, tokoh-tokoh NU sudah memperlihatkan peran politik yang dimainkannya, dari pra-kemerdekaan sampai sekarang. Ini terbukti ketika tampilnya wakil-wakil NU di BPUPKI (Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu KH. Wachid Hasim, KH. Masjukur, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Zainul Arifin.⁹ Keikutsertaan tokoh-tokoh NU dalam perpolitikan, terlihat ketika pada bulan Juni sampai detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi perdebatan hangat dan panjang tentang dasar negara Indonesia.¹⁰ Keterlibatan NU dalam Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa NU bersikap pragmatis dan realistik.¹¹ Terbukti dengan diangkatnya Zaenal Arifin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan di angkatnya Idham Kholid sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).¹²

Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik Islam. Hal ini terjadi karena partai politik yang ada sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri-sendiri dan

⁹ A. Nasir Yusuf, *NU dan Gusdur*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1994), hlm. 17.

¹⁰ Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsep Negara Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Geme Insani Press, 1997), cet. I, hlm. 32-33.

¹¹ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 121.

¹² Ahmad Syaf'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*, hlm. 64.

kurang memperhatikan kepentingan politik nasionalnya secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno juga melontarkan gagasan bahwa Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijewani oleh semangat gotong-royong dan kekeluargaan.

Menghadapi babak baru politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik Islam terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni:

Pertama, Masyumi yang menilai sistem politik Demokrasi Terpimpin adalah otoriter dan menganggap sistem politik Demokrasi Terpimpin merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Karena menurut Ketua Umum Masyumi, demokrasi bukan semata-mata cara yang dapat diubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi merupakan jalan atau pandangan hidup (*way of life*). Demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan salah satu tujuan terbentuknya masyumi yang menegakkan kebebasan spiritual setiap orang dan penumpasan terhadap eksploitasi hanya yang terkuat yang bertahan hidup. *Kedua*, NU, PSII dan Perti, yang tergabung dalam Liga Muslimin, menilai dukungan terhadap sistem yang ada pada saat itu sebagai sikap yang realistik, karena dengan mengakui adanya demokrasi terpimpin, semata-mata dilakukan demi mengupayakan dalam memperjuangkan keinginan sekelompok masyarakat dalam hal ini masyarakat Islam yang merasa tertindas di bawah manajemen kekuasaan kelompok lain. Pada masa Demokrasi Terpimpin, perilaku politik NU hanya berusaha menyelamatkan keadaan organisasi, dengan menerima dan berusaha beradaptasi dengan

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk mempersatukan bangsa Indonesia kedalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).¹³

Periode Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu periode yang kelam bagi perjalanan Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi benar-benar berjalan dan diperaktikan. Suasana kebebasan dan kontrol terhadap pemerintah benar-benar efektif dan berjalan. Tetapi sayang pada periode tersebut, karena para elit politik berebut kekuasaan, menyebabkan kabinet jatuh bangun. Inilah, salah satunya, yang kemudian mengantarkan sistem pemerintahan ke gerbang Demokrasi Terpimpin.¹⁴

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan pokok pada penelitian ini dibatasi pada masalah yang berkenaan dengan kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin. Secara temporal masalah yang diteliti menjangkau rentang waktu antara Tahun 1959-1965. Tahun 1959 merupakan awal dimulainya Demokrasi Terpimpin, sedangkan Tahun 1965 merupakan akhir daripada masa Demokrasi Terpimpin.

Agar dapat diperoleh suatu kejelasan yang lebih mengarah dalam penulisan ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjalanan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?

¹³ Taufik 'Abdullah, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1991), hlm. 388-389.

¹⁴ Lili Romli, *Islam Yes Parati Islam Yes*, hlm. 53.

2. Bagaimana kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin dan respon partai politik Islam terhadap Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perjalanan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam dan mengetahui sejauhmana respon partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengambil segi-segi positif dari nilai-nilai perjuangan bangsa yang terkandung dalam karya sejarah.
- b. Untuk menggali karya sejarah yang berkaitan dengan masalah politik yang ada di Indonesia secara mendalam dan komprehensif.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai sejarah perjuangan bangsa tingkat lokal sebagai karya yang menarik, berbobot

serta tidak membosankan sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual khususnya di bidang sejarah politik.

D. Tinjauan Pustaka

Perjalanan partai politik Islam seperti Masyumi, NU, Perti dan PSII pada masa demokrasi terpimpin ini begitu menarik, apalagi hal itu dikaitkan dengan kebijakan politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap partai politik Islam tersebut. Beberapa kajian yang berhasil dan ditemukan penyusun yaitu:

Buku berjudul “Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965” dan buku “Islam dan Politik di Indonesia”¹⁵ karya Ahmad Syafii Ma’arif menjelaskan tentang relita politik yang tercermin dalam tingkah laku dan praktik partai politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin dengan peranan politik sentral kekuasaan Soekarno. Hubungan dengan penelitiannya ini adalah sikap dari penguasa (Soekarno) dalam memberlakukan atau menempatkan partai politik umat Islam pada masa pemerintahan dengan memposisikan Partai Politik Islam bekerjasama dengan wadah NASAKOM.

Herbert Feith dan Lance Castles (ed) dalam bukunya yang berjudul “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965”¹⁶ menjelaskan mengenai pemikiran

¹⁵ Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1998). hlm. 72.

¹⁶ Herberth Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. (Jakarta: Pustaka Utama, 1995). hlm. 14.

politik yang diterapkan dalam masa demokrasi terpimpin. Di mana dalam kepemimpinan Soekarno telah mengeluarkan suatu manipol yang menurut umat Islam tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Manipol tersebut menimbulkan gerakan kudeta yang akhirnya menyumbangkan pemerintahan yang ada. Perbedaannya dalam karya ini adalah buku ini hanya menuliskan tentang politik Soekarno di Indonesia pada masa Soekarno saja. Adapun yang penyusun teliti adalah kebijakan politik Soekarno pada masa demokrasi terpimpin.

Buku “Islam Yes, Partai Islam Yes”, karya Lili Romli¹⁷ ini merupakan sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia. Buku ini mencoba mencatat hal-hal yang terjadi dalam setiap kurun waktu dalam sejarah politik Indonesia modern, dimulai dari tahun 1945 sampai sekarang. Fokus perhatian yang diberikan adalah pada pertumbuhan partai-partai politik Islam dan hubungannya dengan negara. Perhatian ditujukan pada perkembangan partai-partai Islam pada masa pasca Orde Baru. Munculnya kembali keinginan beberapa partai Islam untuk menambahkan kembali tujuh kata terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat perhatian yang besar buku ini. Buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman terhadap hubungan Islam dan politik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang.

¹⁷ Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, cet. I, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Pustaka Pelajar, 2006).

Sedangkan buku karya Al-Chaidar yang berjudul “Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nasional Liberation Front”¹⁸ menjelaskan mengenai teori dan praktik politik yang dilakukan oleh Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya. Buku ini juga membahas mengenai konsep Negara menurut Islam dalam manajemen kekuasaan dalam budaya Islam yang berkembang dalam sebuah diskursus ketakwaan.

Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul “Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965”,¹⁹ menjelaskan mengenai gagasan Demokrasi Terpimpin dan Implementasinya serta perjuangan politik umat Islam melalui partai-partai politiknya sejak menjelang kemerdekaan hingga masa Demokrasi Terpimpin.

Skripsi Sdr. Ahmad Muhajir, “Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Idham Chalid”²⁰ membahas mengenai dasar pemikiran Idham Chalid mengenai konsep dasar sebuah Negara tentang Demokrasi Terpimpin.

Semua tulisan (penelitian) di atas mengkaji tentang konsep dasar sebuah Negara baik itu pada masa Demokrasi Terpimpin ataupun beberapa hal mengenai Kebijakan Soekarno serta perkembangan politik Islam yang bisa penyusun jadikan acuan dalam penulisan penelitian skripsi ini.

¹⁸ Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nasional Liberation Front*, (Jakarta: Darul Falah, 1999)

¹⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1987).

²⁰ Ahmad Muhajir, “Demokrasi Terpimpin dalam Pemikiran Idham Chalid”, *Skripsi S.I*, Yogyakarta: UPT. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2005).

E. Landasan Teori

Mengkaji Islam politik bukanlah persoalan yang mudah, karena adanya pemahaman yang menyeluruh tentang agama yang dijadikan landasan yang menggerakkan suatu perlawanan, atau yang disebut sebagai ideologi, yang merupakan inti kesadaran pelaku politik. Dinamisme politik Islam berawal dari diskursus (wacana) yang berkembang di tengah atmosfir pemikiran lainnya dalam memahami Islam secara sebenarnya.

Diskursus adalah simbol-simbol bersama yang dipakai dalam komunikasi dengan konsepsi realitas yang pelik pada sebuah kelompok atau masyarakat. Kata-kata frase dan idea-idea memiliki pengertian khusus dalam kelompok yang membuat interaksi menjadi efisien dan memberikan anggota, identitas dan kepemilikan. Orang luar atau kelompok yang baru harus belajar terlebih dahulu melalui sosialisasi tentang bahasa dan asumsi-asumsi dari budaya atau sub budaya sebelum mereka dapat mengerti bagian-bagian kecil komunikasi yang berlangsung atau perasaan aman sebagai anggota.²¹

Dalam agama Islam pengertian kekuasaan ini menjadi sesuatu yang inheren dalam agama-agamanya yang diperoleh lewat suatu sosialisasi penyadaran dengan menggunakan al-Qur'an dan sejarah Nabi Muhammad saw yang bermuara pada penaklukan kota Mekkah di bawah manajemen kekuasaan orde Islam. Politik sebagai salah satu aspek budaya Islam, berkembang dalam sebuah diskursus antara ketakwaan (tunduk kepada perintah atau kekuasaan suci) dan praktek struktur kekuasaan.

²¹ Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam. Studi Harakah Darul Islam dan MoroNasional Liberation Front*. (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 11-12.

Menurut A. H. John, dalam Islam kekuasaan politik yang stabil ditandai oleh sebuah kepercayaan awal bahwa “masyarakat muslim harus diperintah oleh sebuah kepercayaan muslim yang terbaik”. Persamaan moral seluruh pemeluk Islam dan perlunya masyarakat diperintah menurut hukum Tuhan menjadi cita-cita bagi pemikir Islam, bagaimanapun sulitnya untuk menyesuaikan dengan realita politik yang ada.

Teori “tiga Perspektif” dari Taufik ‘Abdullah dan Sharon Shiddiqie, berusaha memberikan pemahaman tentang bagaimana tema pembentukan Negara (Islam politik) diatas tercermin, ini tergantung pada perspektif yang menjadi wawasan seseorang tentang suatu gejala sosial tertentu. Dalam mengurutkan rampatan (generalisasi), dapat melihat suatu gejala social tertentu dari perspektif universal, nasional dan lokal, ketiga perspektif tersebut dapat membrikan pemahaamn terhadap tema pembentukan negara Islam.

Pergolakan ini mempunyai berbagai bentuk dan tampaknya telah mengembangkan sebuah jawaban yang sangat berbeda. Dengan demikian studi ini mengenai artikulasi politik Islam di bawah bayang-bayang pembentukan Negara, menghasilkan suatu jalinan yang kompleks. Dalam hal ini, upaya-upaya yang gigih dalam memperjuangkan keinginan sekelompok masyarakat untuk mengubah nasib yang merasa tertindas dibawah manajemen kekuasaan kelompok ini.

Dasar-dasar pengertian di atas, dipandang cukup untuk dijadikan acuan dalam studi ini sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan dan menganalisis hubungan partai politik Islam dan pergolakan politik pada masa

Demokrasi Terpimpin, namun segala permasalahannya perlu didekati secara politik. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap gejala-gejala yang relevan dari peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya konflik pada masa tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan politik. Pendekatan politik menurut Helius Syamsudin adalah kajian tentang kekuasaan yang diperoleh, digunakan keputusan-keputusan yang dibuat manusia dalam proses menjalankan kekuasaan²².

Di samping itu juga pendekatan behavioral yaitu berkenaan dengan perilaku aktor yang memimpin dan penganut pemimpin, interpretasi terhadap situasi pada zamannya, bentuk-bentuk gerakan dan kejadian setelah adanya gerakan-gerakan tersebut. Membuat kebijakan ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukanlah kebijakan pemerintah itu merupakan pengambilan kebijaksanaan yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

kerangka di atas, penyusun berusaha menjawab masalah seputar peran politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin, dimana pada masa itu partai politik Islam yang semula merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia seperti Masyumi, NU, Perti dan PSII yang kemudian menjadi partai politik.

F. Metode Penelitian

²² Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Depdikbud Dirjendikti PPTA, 1994), hlm. 21.

Jenis penelitian ini menggunakan sistem penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan data melalui penelusuran atas buku-buku, majalah, surat kabar, serta catatan-catatan lain yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pencarian kebenaran dalam penulisan ini. Dalam hal ini, penyusun menggunakan empat pendekatan, yaitu:

1. Heuristik atau Pengumpulan Data

Heuristik adalah suatu tahap awal dalam metode sejarah yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penumpulan sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan atau melalui penelitian keputakaan.²³

Adapun sumber yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis yang berupa buku-buku, dan karya ilmiah lainnya. Untuk itu peneliti berusaha mencari sumber-sumber yang merupakan karya-karya tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Verifikasi atau Kritik Sumber.

Tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran data sejarah yang diperoleh secara kritik eksterior dan intern. Kritik eksterior dilakukan guna menguji keotentikan data sejarah, sedangkan kritik intern digunakan untuk membuktikan keakuratan sebuah data autentik dan untuk mengetahui relevansi suatu data sejarah dengan obyek kajian.

3. Interpretasi atau penafsiran

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya 2001), hlm. 94.

Interpretasi adalah menafsirkan atau sering disebut analisis. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.²⁴ Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap sumber data yang telah diverifikasi sumber data dibawah tema-tema tertentu. Apabila terdapat data yang berbeda dalam suatu permasalahan yang sama peneliti membandingkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan yang lebih mendekati kebenarannya.berdasarkan teori yang dipakai penulis mencoba mengorganisasikan data berdasarkan tema-tema yang akan dibuat dan kemudian ditarik kesimpulan.

4. Historis

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian dengan menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah yang berarti. Historiografi ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota dinas, halaman persembahan, kata penagantar, dan daftar isi. Untuk memperoleh

²⁴ Dudung 'Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58-60.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

suatu karya ilmiah yang sistematis dan konsisten maka perlu adanya pembahasan yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian bab sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Dan secara keseluruhan, hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, membahas sekilas tentang Demokrasi Terpimpin, yang meliputi asal-usul Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam didalamnya memuat tentang partai politik Islam pada masa demokrasi terpimpin dan bentuk-bentuk kebijakan politik Sockarno terhadap partai politik Islam di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pembahasan pada bab ini diharapkan bisa menjelaskan kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam.

Bab keempat, membahas tentang respon partai politik terhadap demokrasi terpimpin dengan sub pembahasan sebagai berikut: Respon terhadap konsep demokrasi, respon terhadap demokrasi terpimpin serta respon terhadap kebijakan Soekarno terhadap partai politik Islam yakni Partai Masyumi, Partai NU, Partai Perti dan PSII. Pembahasan pada bab ini guna

mengetahui sejauhmana respon partai politik Islam terhadap kebijakan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin.

Bab kelima, merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa bab yang kemudian ditarik benang merah, sehingga menjadi suatu rumusan yang bermakna yaitu dalam bentuk kesimpulan. Bab ini adalah penutup yang sekaligus disertai saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah perjalanan Demokrasi Terpimpin, ditandai oleh pelemparan pemikiran, gagasan, serta reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin. Masa ini juga merupakan masa yang memungkinkan sistem itu tegak atas UUD Sementara 1950. Pemerintah dikepalai oleh seorang perdana menteri, sedang kepala negaranya -yang konstitusional- masih tetap Soekarno. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa Soekarno mulai aktif dalam pemerintahan itu; artinya bahwa Presiden tidak lagi bersikap sebagai kepala Negara konstitusional. Kemudian, tanggal 5 Juli 1959 didekritkan dan dengan demikian resmi menjadi kepala pemerintahan. Inilah awal dimulainya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah sistem politik adalah sesuatu yang khas bahkan identik dengan Soekarno. Soekarno pula yang berjaya memimpin pemerintahan di bawah sistem ini selama hampir enam tahun (1959-1965).
- 2) Sistem kebijakan Soekarno terhadap partai politik di masa Demokrasi Terpimpin ini bahwa yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah perjalanan Demokrasi Terpimpin, ditandai oleh pelemparan pemikiran, gagasan, serta reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin. Masa ini juga merupakan masa yang memungkinkan sistem itu tegak atas UUD Sementara 1950. Pemerintah dikepalai oleh seorang perdana menteri, sedang kepala negaranya -yang konstitusional- masih tetap Soekarno. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa Soekarno mulai aktif dalam pemerintahan itu; artinya bahwa Presiden tidak lagi bersikap sebagai kepala Negara konstitusional. Kemudian, tanggal 5 Juli 1959 didekritkan dan dengan demikian resmi menjadi kepala pemerintahan. Inilah awal dimulainya Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah sistem politik adalah sesuatu yang khas bahkan identik dengan Soekarno. Soekarno pula yang berjaya memimpin pemerintahan di bawah sistem ini selama hampir enam tahun (1959-1965).
2. Respon partai politik Islam terhadap Demokrasi Terpimpin terbagi atas dua, yakni: *pertama*, Masyumi yang menolak Demokrasi Terpimpin, karena

dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam bahwa Demokrasi terpimpin sebagai bentuk otoriterian yang akan menghancurkan bangsa dan negara. *Kedua*, Liga Muslim yakni partai Islam NU, PSII, dan Perti, yang setuju dengan Demokrasi Terpimpin sebagai wujud dari ideologi politik keagamaannya. Dengan pemikiran akomodatif, NU dapat bertahan di era Demokrasi Terpimpin, terwakili di semua lembaganya, dan melindungi sayap militan NU yang anti komunis. Keberadaan PSII pada masa Demokrasi terpimpin juga tidak ada yang mampu manyaingi atau menandingi. Hal itu dipengaruhi oleh corak gerakannya yang bersifat integrisionis dan sistemik. Pada akhirnya PSII menerima Demokrasi Terpimpin. Adapun Perti berbeda dengan partai-partai Islam yang lain. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Perti mau bekerja sama dengan komunis seperti dia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh PKI ataupun orang-orang komunis di Cina dan Uni Soviet. Sedangkan Perti berbeda dengan partai-partai Islam yang lain yang anti komunis.

B. Saran-saran

Melalui tulisan ini, penyusun ingin memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi kalangan sejarawan dan umumnya bagi masyarakat luas tentang sebuah proses perjalanan masa lalu dari perilaku seorang tokoh. Dalam hal ini

seorang tokoh nasional yang juga disebut proklamator Indonesia dan iapun seorang muslim yang menjabat sebagai Presiden serta kebijaksanan-kebijaksanaan terhadap Partai Politik Islam yakni Masyumi, PSII, NU dan Perti.

Penyusun mencoba dengan semaksimal mungkin menggali dan menganalisa serta menyusunnya secara sistematis, namun tentunya sesui dengan kemampuan dan kapasitas penulis dalam menggali data, menganalisa data, dan menyusunnya dalam sebuah redaksi kalimat jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap, hal tersebut diatas bukan merupakan hambatan bagi masyarakat, tetapi justru menjadi dorongan untuk menggali lebih mendalam dari sebuah proses masa lalu, sehingga akan mengetahui secara detail dan benar dari sebuah peristiwa dengan teliti dan cermat.

Telah banyak karya dan penelitian yang menyoroti era Demokrasi Terpimpin. Dari sekian karya-karya tersebut, analisis yang sering dipakai adalah analisis politik. Hasilnya adalah sekian dinamika politik mulai dari pembentukan, konsolidasi dan keruntuhan Demokrasi Terpimpin, serta munculnya tokoh-tokoh kunci baru dalam peta politik. Dalam sebuah analisis baru harus digunakan untuk melihat era ini. Salah satu yang patut dicoba adalah melihat Demokrasi Terpimpin dan segala yang berkembang di dalamnya sebagai bagian dari “pencarian identitas” oleh sebuah negara yang baru lepas dari kolonialisme. *Wallāhu A’lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1991).
- Abdurrahman, Duḍung, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999).
- Abu-Zaid, Nasr Hamid. *Imām Syafī'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1978).
- Anshary, Syaifudin, M. Amin Rais, *Pak Natsir 80 Tahun*, (Jakarta: Media Dakwah, 1988).
- Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah konsesus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, (Jakarta: Geme Insani Press, 1997).
- Azizi, Ahmad Qodri, *Islam dan permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Boland, B. J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, Penterjemah Safroedin Bahar, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Penj. Ihsan Ali-Fauzi, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj: Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Feith, Herbert dan Castle, Lance (ed), *Indonesian Political Thinking, 1945-1965*, Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- _____, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (1995)* (Jakarta: LP3ES, 1995).

- _____, *Aswaja/ke-NU-an sesuai GBPP 1994*, Jilid 3 (Surabaya: Lembaga Pendidikan Maarif NU, 1994).
- _____, *Soekarno - Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- I. N., Soebagijo, *KH. Masjuk*, (Jakarta: Gunug Agung, 1982).
- Irsyam, Mahrus. *Ulama dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984).
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Berkerjasama dengan LkiS, 1999).
- Karim, M. Rusli. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia sebuah potret Pasang Surut*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991).
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995).
- Liddle, R. William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Penterjemah Nung Katjasungkana, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- _____, *Islam Kekuatan dan Keagamaan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Machrus Irsyam, *Bendera Hijau di Cakrawala Politik Indonesia*, (Panji Masyarakat No. 183, 1981).
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, cet. I, (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Muhajir, Ahmad, *Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran Idham Chalid*, Yogyakarta: UPT. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2005).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, cet. I, (Yogyakarta: Sipress, 1992).

- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, (1952).
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1987).
- Romli, Lili *Islam Yes Parati Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006).
- R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, terj. Nung Katjasungkana, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Sitompul, Einar Martahan, M, Th, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989).
- Subakti Ramelan. *Mamahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992).
- S. U. Bajasut. *Alam, Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*, (Surabaya Dokumen, 1972).
- Soekarno. *Panca Azimat Revolusi*, (Surabaya: GRIP, 1965).
- Syamsudin, Helius. *Metodologi Sejarah*, (Jakarta, Depdikbud Dirjendikti PPTA, 1994.
- Thaba, ‘Abdul ‘Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 1966-1994*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Wahid, Abdurrahman, dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990).
- Young Soon, Kang, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan NU*, (Jakarta: UI-Press, 2007).
- Yusuf, A. Nasir. *NU dan Gusdur*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1994.
- Zaini A. Wahid. *Dunia Pemikiran Kaum Santri., Program Nyata Nahdotul Ulama Dalam Perspektif Perkembangan Menuju Era Tinggal Landas*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1994).
- Zaini, Achmad. *Kyai Abdul Wahid Hasjim: His Contribution to Muslim Educational Reform and Indonesian Nationalism during the Twentieth Century*, (Indonesian Academic Society XXI, 1998).
- Zuhri, KH. Saifuddin. *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).